

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam pasal 1 yang dimaksud wisata, wisatawan, dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha

2.2 Desa Wisata

Salah satu hal yang menarik dalam menciptakan suatu kawasan pariwisata ialah berdasarkan kebudayaan yang terdapat pada kawasan tersebut. Kondisi inilah yang mendasari terciptanya kegiatan pariwisata di suatu desa karena kekhasan budaya masyarakat yang mendiami daerah tersebut (Hadiwijoyo, 2012):

1. Aksesibilitas baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas

2.3 Potensi Wisata

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Tempat tersebut memiliki indikator yaitu :

- a. Keunikan.
- b. Keindahan.
- c. Keaneka Ragaman Kekayaan Alam.
- d. Budaya.

Dari berbagai penjelasan para ahli dan Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat, dapat disimpulkan Potensi Pariwisata adalah sumber daya yang mampu dikembangkan lagi menjadi lebih besar dan menarik minat seseorang untuk datang mencari kepuasan

2.4 Jenis – Jenis Pariwisata

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah biasanya karena ingin sekedar untuk refreshing dan sekedar untuk berjalan-jalan. Selain itu, ada juga yang melakukan perjalanan wisata karena ada urusan bisnis ke suatu daerah. Ada berbagai jenis pariwisata yang dikelompokkan berdasarkan tujuan atau motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Berikut jenis-jenis Pariwisata (Spillane 1987) :

1.Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

2.Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

3.Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism)

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.

4. Pariwisata untuk Olahraga (Sports Tourism)

Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori :

a. Big Sports Event, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan lain-lain.

b. Sporting Tourism of the Practitioner, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.

5. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism)

Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

6. Pariwisata untuk Berkonvensi (Convention Tourism)

Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.

2.5 Objek Daya Tarik Wisata

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 Bab III Pasal IV tentang kepariwisataan menjelaskan perbedaan antara objek dan daya tarik wisata adalah :

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.

3. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi :
 - a. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah (candi, makam), museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat. Dan yang bersifat alamiah, seperti : keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan sebagainya.

2.6 Pedoman Analisis Objek Daya Tarik Wisata

Kriteria yang dipakai sebagai dasar dalam penilaian terdiri dari : daya tarik (potensi kawasan/areal), Aksesibilitas, dan prasarana dan sarana penunjang,. Dari masing-masing kriteria tersebut di atas, dalam penilaiannya terdiri dari unsur dan sub unsur yang sangat berkaitan. Nilai dari masing- masing unsur dan sub unsur dapat berlainan, tergantung dari kondisi obyek yang dinilai, berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan, Adapun nilai/bobot tiap kriteria maupun nilai dari masing-masing kriteria diuraikan sebagai berikut :

A. Daya Tarik

Penilaian kriteria daya tarik kawasan obyek dibedakan menjadi 5 jenis yaitu obyek wisata berbentuk darat (kawasan hutan), taman laut, pantai, danau dan gua—gua alam. Bobot kriteria daya tarik perlu diberi angka tertinggi yaitu 6. hal ini mengingat daya tarik merupakan modal utama yang memungkinkan datangnya pengunjung. Unsur-unsur daya tarik berbentuk darat (kawasan hutan) meliputi

1. Keindahan alam
2. Keunikan sumberdaya alam
3. Banyaknya jenis sumber daya alam yang menonjol
4. Keutuhan sumber daya alam
5. Kepekaan sumber daya alam

6. Jenis kegiatan wisata
7. Kebersihan lokasi
8. Keamanan kawasan

Unsur daya tarik berbentuk taman laut meliputi :

1. Keindahan alam
2. Keanekaragaman jenis.
3. Keunikan dan keindahan dalam laut
4. Keutuhan potensi
5. Kejernihan air
6. Banyaknya lokasi yang mempunyai kedalaman sama
7. Keindahan pandangan dan kenyamanan pantai
8. Kebersihan.

Unsur daya tarik berbentuk pantai meliputi:

1. Keindahan
2. Keselamatan/keamanan pantai
3. Jenis dan warna pasir
4. Variasi kegiatan
5. Kebersihan
6. Lebar pantai (diukur waktu surut terendah)
7. Kenyamanan.

Unsur-unsur daya tarik berbentuk danau meliputi:

1. Keindahan
2. Kekhasan lingkungan danau.
3. Variasi kegiatan
4. Kebersihan
5. Kenyamanan
6. Keselamatan

Unsur daya tarik berbentuk gua alam meliputi:

1. Keunikan dan kelangkaan
2. Keaslian
3. Keindahan/keragaman

4. Keutuhan tata lingkungan
5. Kepekaan

B. Aksesibilitas

Bobot penilaian kriteria aksesibilitas adalah 5, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong potensi pasar.

Unsur—unsur kriteria kadar aksesibilitas meliputi:

1. Kondisi jalan
2. Jarak dari pusat Kota
3. Waktu tempuh dari pusat Kota

C. Sarana dan Prasarana Penunjang

Peranan sarana dan prasarana pengunjung untuk menunjang kemudahan dan kenikmatan pengunjung. Karena sifatnya sebagai penunjang dan pengadaannya tidak terlalu sulit maka diberi nilai bobot 3. Unsur yang terkandung dalam penilaian kriteria ini meliputi :

1. Kelengkapan sarana
2. Kelengkapan prasarana

1.6.1 Bobot Penilaian Objek Wisata

Tabel 2.1

Angka bobot aspek penilaian pariwisata

No	Aspek	Bobot	Keterangan
1.	Daya tarik	6	Daya tarik diberi 6 karena daya tarik merupakan faktor utama alasan seseorang melakukan perjalanan wisata
2.	Aksesibilitas	5	Aksesibilitas diberi bobot 5 karena merupakan faktor penting yang mendukung wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata
3.	Sarana prasarana	3	Sarana dan prasarana diberi bobot 3 karena hanya bersifat sebagai penunjang dalam kegiatan wisata

Sumber: *Pedoman Analisis Objek Daya Tarik Wisata Dirjen PHKA*

Kriteria daya tarik diberi 6 karena daya tarik merupakan faktor utama alasan seseorang melakukan perjalanan wisata. Aksesibilitas diberi bobot 5 karena merupakan faktor penting yang mendukung wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata. Untuk akomodasi serta sarana dan prasarana diberi bobot 3 karena hanya bersifat sebagai penunjang dalam kegiatan wisata. Skor yang

diperoleh kemudian dibandingkan dengan skor total suatu kriteria apabila setiap sub kriteria memiliki nilai kuat yaitu 5. Karsudi dkk (2010) menyatakan setelah dilakukan perbandingan, maka akan diperoleh indeks kelayakan dalam persen. Indeks kelayakan suatu kawasan pariwisata adalah sebagai berikut:

1.6.2 Indeks Kelayakan Penilaian Objek Wisata

Tabel 2.2
Inde Kelayakan Objek Wisata (%)

Angka kelayakan dalam (%)	Keterangan
Tingkat kelayakan >66 %	Layak dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang tinggi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta didukung oleh aksesibilitas yang memadai
Tingkat kelayakan >33,3 – 66,5%	Belum layak dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, saran dan prasarana yang sedang berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta didukung oleh aksesibilitas yang cukup memadai.
Tingkat kelayakan <33,2 %	Tidak layak dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang rendah berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta aksesibilitas yang kurang memadai

Sumber: *Pedoman Analisis Objek Daya Tarik Wisata Dirjen PHKA*

2.7 Unsur-unsur Pokok Pengembangan Pariwisata

Unsur pokok yang dapat menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi :

1. Atraksi

Atraksi merupakan pusat dari industri pariwisata. Atraksi dapat timbul dari keadaan alam, obyek buatan manusia, ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya.

2. Amenitas

Fasilitas ini maksudnya memberikan pelayanan dan menyediakan sarana yang dibutuhkan para wisatawan. Fasilitas dan pelayanan yang harus disediakan meliputi fasilitas pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari, untuk menginap, tempat makan dan minum, keamanan dan lain sebagainya yang menyangkut kebutuhan wisatawan. Satu hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan menginap, sebaiknya konsep penginapan tersebut disesuaikan dengan budaya setempat sehingga para wisatawan dapat benar-benar menikmati kehidupan dan budaya setempat.

3. Aksesibilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dari satu wilayah. Dalam kegiatan pariwisata hanya mungkin berkembang dengan teknologi modern khususnya di bidang transportasi dan komunikasi. Transportasi ini sangat penting guna membantu para wisatawan, mengantar dari tempat asal atau tempat penginapan ke obyek wisata. Namun pengguna transportasi ini tergantung kepada jarak dan kebutuhan komunikasi antara tempat dimulainya suatu kunjungan ke obyek wisata yang akan dikunjungi

Menurut Siswanto (2006), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 4 unsur :

1. Objek dan daya tarik wisata.

Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

2. Prasarana wisata.

Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata.

3. Sarana wisata.

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

4. Masyarakat/lingkungan.

Daerah tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan. Masyarakat di sekitar objek wisata adalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan.

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pariwisata Republik Indonesia menyebutkan berkembangnya pariwisata sangat tergantung pada empat faktor yaitu:

1. Attractions (daya tarik); • Site attractions (tempat-tempat bersejarah, tempat dengan iklim yang baik, pemandangan indah). • Event attractions (kejadian atau peristiwa) misalnya konggres, pameran atau peristiwa lainnya.
2. Amenities (fasilitas) adalah sarana prasarana penunjang yang harus ada pada objek daya tarik wisata yang akan dikembangkan
3. Aksesibilitas adalah tempatnya tidak terlampaui jauh, tersedianya transportasi ke lokasi tersebut secara teratur, sering, murah, aman dan nyaman.
4. Tourist organization untuk menyusun suatu kerangka pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata serta mempromosikan daerah sehingga dikenal orang.

2.8 Indikator Objek Daya Tarik Wisata

Suatu Kawasan dikatakan sebuah desa wisata jika dapat memenuhi beberapa Standarisasi yang telah ditentukan . Pengembangan desa wisata harus memenuhi Beberapa prasyarat dasar , indikator – indikator tersebut dapat dilihat pada table dibawah :

Tabel 2.3

Indikator Objek daya tarik wisata

No	Aspek	Jenis Kebutuhan	Penjabaran
1.	Objek daya tarik wisata alam	Keindahan wisata	Daya tarik wisata yang memunculkan keindahan ada di lokasi
		Kekhasan wisata	Daya tarik yang memiliki ciri khas
		Kegiatan wisata alam	Jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan
		Kebersihan lokasi wisata Kenyamanan Lokasi wisata	Tingkat kebersihan dan kenyamanan lokasi wisata
2.	Aksesibilitas	Kondisi Jalan & jarak tempuh dari Ibu Kota	Kondisi jalan menuju lokasi wisata dari Ibu Kota
		Gerbang udara Internasional	Bandar udara terdekat dengan lokasi wisata

		Jarak dari Ibu Kota Provinsi	Waktu tempuh lokasi wisata dari pusat kota
		Frekuensi kendaraan	Jumlah kendaraan yang menuju lokasi wisata
3.	Sarana prasarana Wisata	Sarana Penunjang	Jumlah fasilitas sarana penunjang wisata
		Prasarana Penunjang	Jumlah fasilitas prasarana penunjang wisata

Sumber : (Sedarmayanti, 2018)

Atraksi dan Potensi Daya Tarik Wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.

- Jarak tempuh, yaitu jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi dan jarak dari Ibu Kota Kabupaten.
- Sarana dan Prasarana, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan seperti akomodasi, rumah makan, penginapan warga (*homestay*), dan lain-lain.
- Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, yaitu menyangkut kegiatan ritual keagamaan dan kebudayaan yang secara rutin dilaksanakan.
- Ketersediaan infrastruktur, yaitu meliputi fasilitas pelayanan dan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya
- Keberadaan masyarakat lokal sebagai penggerak utama, yaitu pengelolaan desa wisata secara langsung dikelola oleh masyarakat desa
- Aspek Sosial, Budaya dan Keamanan, yaitu menyangkut kondisi sosial dan budaya setempat termasuk kondisi keamanan.

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Daya tarik wisata

No.	Unsur	Nilai				
		Ada 5	Ada 4	Ada 3	Ada 2	Ada 1
1.	Keindahan :	Ada 5	Ada 4	Ada 3	Ada 2	Ada 1
	a. pemandangan indah menuju danau	30	25	20	15	10
	b. pemandangan indah dari danau ke sekitar					
	c. keserasian bangunan dengan lingkungan					
	d. keserasian suasana					
2.	e. keindahan dalam danau					
	Kekhasan lingkungan waduk :	Ada 5	Ada 4	Ada 3	Ada 2	Ada 1
	a. ada nilai sejarah	30	25	20	15	10

No.	Unsur	Nilai				
	b. ada pulau c. kekhasan flora d. kekhasan fauna e. kekhasan budaya					
3.	Kegiatan wisata yang dilakukan : a. Camping b. Wisata air (perahu, berenang) c. Menikmati keindahan alam d. Kuliner e. Memancing	Ada 5 30	Ada 4 25	Ada 3 20	Ada 2 15	Ada 1 10
4.	Kebersihan lokasi objek wisata, terhindar dari: a. Industri b. Jalan ramai c. Pemukiman penduduk d. Sampah e. Vandalisme	Ada 5 30	Ada 4 25	Ada 3 20	Ada 2 15	Ada 1 10
5.	Kenyamanan: a. Bebas bau yang mengganggu b. Ada tepi danau yang landai c. Tidak ada lalu lintas yang mengganggu d. Udara sejuk e. Bebas kebisingan	Ada 5 30	Ada 4 25	Ada 3 20	Ada 2 15	Ada 1 10
6.	Keselamatan: a. Tidak arus yang berbahaya b. Bebas gangguan tumbuhan berbahaya c. Bebas kepercayaan yang mengganggu d. bebas gangguan binatang berbahaya e. Bebas gangguan manusia	Ada 5 30	Ada 4 25	Ada 3 20	Ada 2 15	Ada 1 10

Sumber: Pedoman Analisis Objek Daya Tarik Wisata Dirjen PHKA

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian sarana prasarana penunjang wisata

No.	Unsur	Nilai				
1.	Sarana: a. Warung b. Bank c. Pasar d. Toko cinderamata e. Rumah makan	>4 macam 30	3 macam 25	2 macam 20	1 macam 15	tidak ada 10

2.	Prasarana:	>4 macam	3 macam	2 macam	1 macam	tidak ada
	a. Kantor pemerintahan b. Puskesmas c. Jaringan air minum d. Jaringan listrik e. Jaringan telepon f. Arel parkir g. Jalan h. Dermaga	30	25	20	15	10

Sumber: Pedoman Analisis Objek Daya Tarik Wisata Dirjen PHKA

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Aksesibilitas

No.	Unsur	NILAI				
1	Kondisi dan jarak jalan darat dari Ibu Kota Provinsi	BAIK	CUKUP	SEDANG	BURUK	
	< 75 km	80	60	40	20	
	76-150 km	60	40	25	15	
	151-225 km	40	20	15	8	
	>225 km	20	10	5	1	
2	Pintu gerbang udara internasional/Domestik	Jarak Dalam KM				
		S/d 150	151-300	301-450	451-600	>600
	Jayapura/Ambon	15	20	5	1	-
	Medan/Manado	25	20	15	10	5
	Denpasar	30	25	20	15	10
Jakarta	40	35	30	25	20	
3	Waktu tempuh dari Ibu Kota Provinsi	Jarak Dalam KM				
		1-2	2-3	3-4	4-5	>5
		30	25	20	15	10
4	Frekuensi kendaraan dan pusat informasi ke obyek wisata (buah/hari)	>50	40-49	30-39	20-29	0-19
		30	25	20	15	10
Jumlah						

Sumber: Pedoman Analisis Objek Daya Tarik Wisata Dirjen PHKA

2.9 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi jika diartikan sebagai keterlibatan seorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu, dengan pengertiannya, seseorang bisa berpartisipasi atau lain kata adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan suatu upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam suatu

proses evaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007) . Partisipasi masyarakat dibagi pula menjadi 6 pengertian antara lain adalah :

- Partisipasi adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam sebuah pengambilan keputusan
- Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan oleh masyarakat sendiri
- Partisipasi adalah sebuah proses yang aktif, yang mengandung suatu arti bahwa kelompok terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tersebut
- Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial
- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka sendiri
- Partisipasi adalah penekanan pada pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi suatu proyek dalam suatu pembangunan

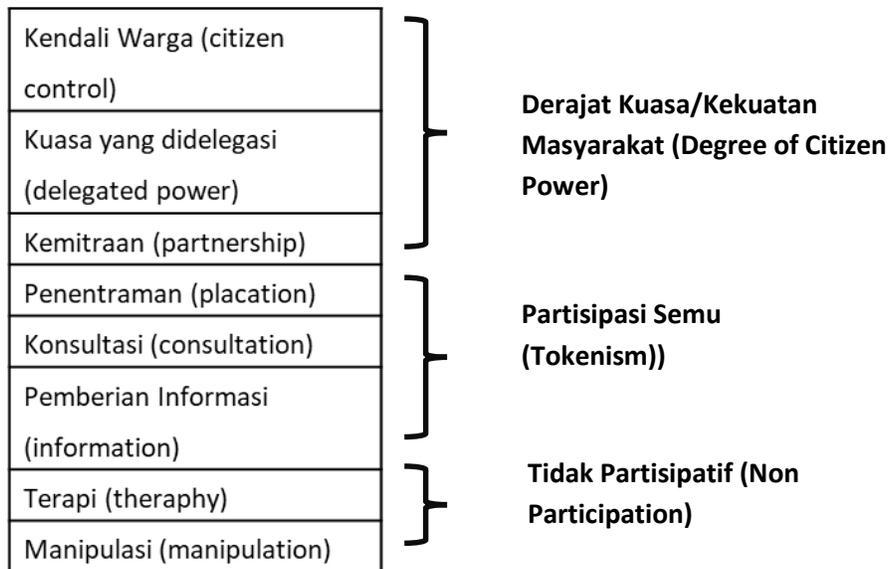
2.10 Tipologi Partisipasi Masyarakat

Tabel 2.7

Partisipasi masyarakat berdasarkan tipologi

No.	Tipologi	Karakteristik
1	Partisipasi manipulatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat diberi tahu apa yang sedang terjadi • Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat. • Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran
2	Partisipasi informatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian • Masyarakat tidak diberi kesempatan terlibat dan mempengaruhi proses penelitian • Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat

No.	Tipologi	Karakteristik
3	Partisipasi konsultatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi • Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya • Tidak peluang untuk pembuatan keputusan bersama • Para profesional tidak wajib untuk mengajukan pandangan • Masyarakat (sebagai masukan) untuk di tindak lanjuti
4	Partisipasi insentif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memberikan korbanan/ jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif / upah • Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen yang dilakukan • Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan
5	Partisipasi fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek • Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan- keputusan utama yang disepakati • Pada tahap awal masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
6	Partisipasi interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan • Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis • Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan, sehingga memiliki andil proses kegiatan
7	Self mobilization (mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah system atau nilai yang mereka miliki • Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. • Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan



Gambar 2.1

Partisipasi Masyarakat berdasarkan tingkatan

Tingkatan tangga partisipasi identik dengan kekuasaan masyarakat, seperti penjelasan berikut:

1) Pasif/manipulatif

partisipasi yang tidak perlu menuntut partisipan untuk terlibat banyak. Perusahaan sebagai pengelola kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata akan meminta anggota komunitas (misal ketua RT atau orang yang berpengaruh) untuk mengumpulkan tanda tangan warga sebagai wujud kesediaan dan dukungan warga terhadap perusahaan atau instansi yang dimaksud. Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog.

2) Terapi

partisipasi yang melibatkan anggota komunitas lokal dan anggota komunitas lokal memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tetapi jawaban anggota komunitas tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan tidak ada pengaruh dalam mempengaruhi keadaan.

3) Pemberian informasi

kegiatan yang dilakukan oleh instansi penyelenggara kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata sekedar melakukan pemberitahuan searah atau sosialisasi ke komunitas sasaran kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata. Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak

ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (feedback).

4) Konsultasi,

Tingkatan ini anggota komunitas diberikan pendampingan dan konsultasi dari semua pihak (pemerintah, perusahaan, dan instansi lain terkait) sehingga pandangan-pandangan diberitahukan dan tetap dilibatkan dalam penentuan keputusan. Model ini memberikan kesempatan dan hak kepada wakil dari penduduk lokal (misalnya pemuka adat, agama, aparat desa) untuk menyampaikan pandangannya terhadap wilayahnya (sistem perwakilan).

5) Penentraman

Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan susulan kegiatan. Namun pemerintah atau instansi penyelenggara kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Hal ini dilakukan agar warga yang telah mendapat insentif segan untuk menentang kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata.

6) Kemitraan

Partisipasi fungsional dimana semua pihak mewujudkan keputusan bersama (pemerintah/instansi, dan komunitas). Suatu bentuk partisipasi yang melibatkan tokoh komunitas dan atau ditambah lagi oleh warga komunitas, “duduk berdampingan” dengan aparat pemerintahan serta perusahaan/instansi terkait secara bersama-sama merancang sebuah kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata yang akan diterapkan pada komunitas.

7) Pendelegasian wewenang

Suatu bentuk partisipasi aktif dimana anggota komunitas melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring. Anggota komunitas diberikan kekuasaan untuk melaksanakan sebuah kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata dengan dengan cara ikut memberikan proposal bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata bahkan pengutamaan pembuatan proposal oleh komunitas yang bersangkutan dengan kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata itu sendiri.

8) Kendali warga

dalam tahap ini sudah terbentuk monitoring oleh komunitas lokal terhadap pemerintah dan perusahaan/instansi penyelenggara kegiatan pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata.

Tabel 2.7
Indikator Pengukuran Partisipasi Masyarakat

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Partisipasi	Keterlibatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Penyampaian pendapat • Kualitas pendapat
	Kesukarelaan	<ul style="list-style-type: none"> • Spontan • Terinduksi • Pemaksaan
	Lingkup kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan keputusan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pemantauan evaluasi • Pemanfaatan hasil

(Krisnha, 2015)

Tabel 2.8
Variabel Partisipasi Masyarakat

Indikator	Penjabaran
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat diikut sertakan dalam musyawarah penentu kebijakan • Masyarakat aktif dalam mengajukan pendapat mengenai kebijakan pariwisata
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Pertunjukan/atraksi wisata yang dipertunjukkan oleh masyarakat local • Masyarakat menyediakan fasilitas kenyamanan wisata • Masyarakat menyediakan pemandu wisata • Pelaku wisata berasal dari masyarakat local • Terdapat penjual cinderamata, manik-manik, oleh-oleh khas wisata setempat yang dibuat masyarakat local • Masyarakat turut serta dalam menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan daerah wisata

Indikator	Penjabaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Keramahan masyarakat terhadap wisatawan • Masyarakat turut serta mempromosikan objek wisata
Pemantauan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dan pihak terkait mengadakan rapat wajib mengenai perkembangan desa • Masyarakat aktif membrikan kritik dan masukan terhadap pengembangan desa • Adanya monitoring dari masyarakat terhadap kegiatan pengembangan desa
Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi lapangan usaha baru bagi masyarakat • Tingkat penghasilan masyarakat sesuai UMK

(Krisnha,2015)

2.10 Bentuk-bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi social, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertical dan partisipasi horizontal.

- a) Partisipasi vertical adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- b) Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

2.11 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat factor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya factor usia, terbatasnya harta, benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemsayarakatan yang ada. Umumnya mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang bertasipasi daripada mereka yang dai kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalm kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan wanita yang terutama adalahmengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan yang semakin baik.

c. Pendapatan

Pendapatan dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan. Karena umumnya pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan didapat. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencakupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk bertasipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarkat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian, sehingga fokusnya lebih kepada pendapatan atau penghasilan dari masyarakat, bukan dari jenis pekerjaan.

d. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk bertasipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.